

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Basis pengguna akuntansi sektor publik di Indonesia telah tumbuh secara signifikan karena penerapan undang-undang otonomi daerah. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 menjelaskan bahwa otonomi daerah memiliki keistimewaan, wewenang, dan tanggung jawab untuk mengawasi dan mengatur kegiatan pemerintahan dan kepentingan penduduk setempat. Dengan kata lain, daerah dan kabupaten di Indonesia dibiarkan tumbuh dan berkembang sumber pendapatannya untuk kepentingan masyarakat setempat dan kemajuan daerah.

Pemerintah daerah dituntut untuk mampu menciptakan sistem manajemen yang mampu mendukung operasional daerah. Salah satunya adalah aspek dari pemerintah daerah yang harus diatur secara hati-hati mengenai masalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Pengukuran kinerja sendiri sangat penting untuk menilai akuntabilitas pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah. Akuntabilitas digunakan bukan hanya sekedar untuk menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan yang menunjukkan bahwa uang publik tersebut di belanjakan secara ekonomis, efektif, dan efisien.

Kinerja keuangan adalah area penting untuk penelitian di perusahaan sektor publik. Setiap perusahaan sektor publik khususnya pemerintah dituntut untuk dapat mencapai kinerja keuangan pemerintah yang baik sejak munculnya penganggaran berbasis kinerja. Untuk memenuhi tuntutan akuntabilitas publik yang lebih besar

kepada organisasi publik, diharapkan setiap entitas sektor publik di pusat dan daerah mampu mengurangi kecurangan dan perilaku negatif lainnya seperti pemborosan dan kebocoran uang.

Menurut Rudy Badrudin (2017:98), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan suatu rencana kerja pemerintah daerah yang mencakup seluruh pendapatan dan pengeluaran pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten, dan kota dalam rangka mencapai sasaran pembangunan dalam kurun waktu satu tahun yang dinyatakan dalam satuan uang dan dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam peraturan perundang-undangan yang disebut dengan Peraturan Daerah. APBD berfungsi sebagai catatan arus masuk dan keluar keuangan yang terkait dengan pelaksanaan otonomi daerah dan menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah dalam merencanakan pertumbuhan daerahnya.

Menurut Kurnia (2016) Agar pengelolaan APBD dapat mandiri, efektif, dan efisien, maka harus ada standar yang menjadi acuan. Oleh karena itu, penilaian kinerja keuangan daerah sangat penting untuk dijadikan tolak ukur dalam penyusunan kebijakan tahunan anggaran yang akan datang.

Kemampuan untuk mengembangkan sistem manajemen yang dapat mendukung operasional daerah merupakan persyaratan bagi pemerintah daerah. Salah satu bidang pemerintahan daerah yang membutuhkan pengaturan yang efektif adalah masalah pengelolaan APBD dan keuangan daerah. Dalam rangka mengevaluasi akuntabilitas pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah, evaluasi kinerja menjadi sangat penting.

Kinerja keuangan menurut Wiratna (2017:71) adalah suatu hasil dari evaluasi terhadap pekerjaan yang telah selesai dilakukan dan kemudian hasil

tersebut dibandingkan dengan kriteria yang telah ditetapkan. Setiap pekerjaan yang telah selesai dilakukan perlu dilakukannya penilaian atau pengukuran secara periodik. Untuk memenuhi tuntutan akuntabilitas publik yang lebih besar kepada organisasi publik, diharapkan setiap entitas sektor publik di pusat dan daerah mampu mengurangi kecurangan dan perilaku negatif lainnya seperti pemborosan dan kebocoran uang. Pemerintah bertugas meningkatkan kesejahteraan warganya dan menjaga keinginan mereka untuk membangun administrasi yang baik.

Organisasi pemerintah menggunakan penilaian kinerja sebagai alat manajemen untuk meningkatkan akuntabilitas dan standar pengambilan keputusan. Upaya untuk mengetahui derajat keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tindakan sesuai dengan maksud dan tujuan yang telah ditetapkan untuk mencapai visi dan misi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja adalah metode mengevaluasi tindakan yang diambil terhadap standar yang dikembangkan untuk organisasi pemerintah. *Value For Money*, yang sering disebut dengan ekonomi, efisiensi dan efektivitas, dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah melalui penganggaran berbasis kinerja.

Laporan yang digunakan untuk pengukuran kinerja adalah laporan pencapaian anggaran (LRA). Laporan capaian anggaran yang dikeluarkan pemerintah daerah dapat memberikan informasi yang sangat berguna untuk menilai kinerja fiskal daerah. Laporan realisasi anggaran merupakan jenis laporan keuangan daerah yang dahulu dihasilkan sebelum kemudian di syaratkan untuk membuat laporan neraca dan arus kas (Sihombing, 2018).

Berdasarkan dengan latar belakang diatas, maka penulis melakukan penelitian yang berjudul:

**“Analisis Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Berdasarkan *Value For Money* Pada Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir Kecamatan Kayuagung (OKI)”**

## **1.2 Batasan Masalah**

Agar peneliti lebih terarah dan lebih fokus pada permasalahan yang akan diteliti, maka peneliti membatasi permasalahan pada Analisis Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Berdasarkan *Value For Money* Pada Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir Kecamatan Kayuagung (OKI).Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimanakah pengukuran kinerja pemerintah daerah dengan menggunakan prinsip *Value For Money* pada Kantor Kecamatan Kayuagung Ogan Komering Ilir (OKI)?” Tujuan Penelitian Adapun tujuan dalam penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimana pengukuran kinerja pemerintah daerah di Kantor Kecamatan Kayuagung Ogan Komering Ilir (OKI) dengan menggunakan prinsip *Value For Money* sesuai dengan bagaimana permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya.

## **1.3 Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Bagi Lembaga**

Penelitian ini diharapkan nantinya dapat membantu mahasiswa untuk mendapatkan perspektif dan pengetahuan baru serta memperluas pemikiran mereka dan juga dapat digunakan sebagai media

pembelajaran di perpustakaan yang bermanfaat bagi mahasiswa khususnya Fakultas Ekonomi Universitas PGRI Palembang.

## 2. Manfaat Bagi Objek

Memberikan saran dan wawasan yang dapat digunakan pemerintah untuk memandu keputusannya tentang bagaimana mengawasi kinerja pemerintah daerah. Dan juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi institut dalam mengambil langkah strategis yang secara efektif.

### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimanakah pengukuran kinerja pemerintah daerah dengan menggunakan prinsip *Value For Money* pada Kantor Kecamatan Kayuagung Ogan Komereng Ilir (OKI)?”

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dalam penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimana pengukuran kinerja pemerintah daerah di Kantor Kecamatan Kayuagung Ogan Komereng Ilir (OKI) dengan menggunakan prinsip *Value For Money* sesuai dengan bagaimana permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya.

## **1.6 Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Bagi Lembaga**

Penelitian ini diharapkan nantinya dapat membantu mahasiswa untuk mendapatkan perspektif dan pengetahuan baru serta memperluas pemikiran mereka dan juga dapat digunakan sebagai media pembelajaran di perpustakaan yang bermanfaat bagi mahasiswa khususnya Fakultas Ekonomi Universitas PGRI

### **2. Manfaat Bagi Objek**

Memberikan saran dan wawasan yang dapat digunakan pemerintah untuk memandu keputusannya tentang bagaimana mengawasi kinerja pemerintah daerah. Dan juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi institut dalam mengambil langkah strategis yang secara efektif.